

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**RENCANA KERJA
(RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 304/SET.DPRD/V-2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 113/SET.DPRD/2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode Perubahan Tahun 2025.

KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :

- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

- b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Pariaman.
- d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

KEEMPAT : Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ini, Anggaran Penyusunan Renja
Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 21 Mei 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Padang Pariaman

Drs. ARMEYN FANGKUTI, M.Si
NIP. 19681111 199203 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Sekretariat DPRD yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Sekretariat DPRD Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 21 Mei 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
Drs. ARMEYN RKT, M.Si
NIP. 19681111 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Penyusunan	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	15
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD	34
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	49
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	63
3.3. Program dan Kegiatan	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
BAB V PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD (Renja Sekretariat DPRD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja Perubahan Sekretariat DPRD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja Perubahan Sekretariat DPRD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan Sekretariat DPRD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja Perubahan Sekretariat DPRD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja Perubahan Sekretariat DPRD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja Perubahan Sekretariat DPRD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi

program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja Perubahan Sekretariat DPRD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan Sekretariat DPRD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja Perubahan Sekretariat DPRD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perubahan Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja Perubahan Sekretariat DPRD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja Perubahan Sekretariat DPRD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja Perubahan Sekretariat DPRD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja Perubahan Sekretariat DPRD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja Perubahan Sekretariat DPRD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja Perubahan Sekretariat DPRD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan

tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja Perubahan Sekretariat DPRD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

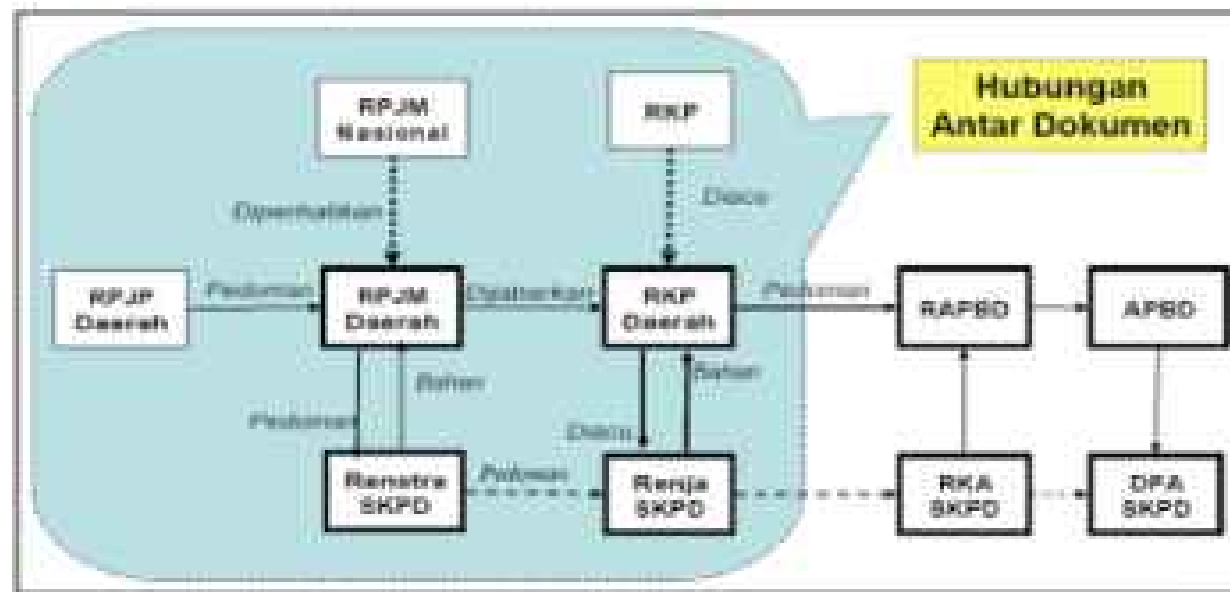
Selain itu, Renja Perubahan Sekretariat DPRD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja Perubahan Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja Perubahan Sekretariat DPRD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja Perubahan Sekretariat DPRD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja Perubahan Sekretariat DPRD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Sekretariat DPRD merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan

sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Sekretariat DPRD merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Sekretariat DPRD dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Sekretariat DPRD dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Sekretariat DPRD memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Sekretariat DPRD dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Sekretariat DPRD akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Sekretariat DPRD untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Sekretariat DPRD diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Sekretariat DPRD untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Sekretariat DPRD akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan

masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Sekretariat DPRD dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Sekretariat DPRD juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Sekretariat DPRD didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas

dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Sekretariat DPRD yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target

sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sekretariat DPRD. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4	0	0	Orang	75.000.000	0	0
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	Orang	75.000.000	0	0
	JUMLAH					75.000.000	0	0

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	0	0	Dokumen	401.072.800	0	0
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	0	25	Laporan	40.060.000	0	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	0	0	Paket	66.090.000	0	0
	JUMLAH					106.150.000	0	0

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	0	0	Dokumen	274.804.400	0	0
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	0	25	Laporan	130.502.700	0	0

2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	0	0	Paket	61.250.000	0	0
JUMLAH						191.752.700	0	0

4. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		3	0	0	Dokumen	18.600.602.089	0	0
1.	Penyediaan Pakatan Dinas dan Atribut DPRD	5	0	0	Setel	731.120.000	0	0
2.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	40	0	0	Orang	155.568.200	0	0
JUMLAH						886.688.200	0	0

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD								
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		6	0	0	Ranperda	193.628.000	0	0
1	Pembahasan Rancangan Perda	6	0	0	Ranperda	193.628.000	0	0
JUMLAH						193.628.000	0	0

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

2. Pelaksanaan Kebijakan Anggaran								
NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD								
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		5	0	0	Dokumen	299.635.000	0	0
1	Pembahasan KUA dan PRAS	1	0	0	Dokumen	59.410.000	0	0
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PRAS	1	0	0	Dokumen	60.415.000	0	0
3	Pembahasan APBD	1	0	0	Dokumen	60.160.000	0	0
4	Pembahasan APBD Perubahan	1	0	0	Dokumen	60.160.000	0	0
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	0	0	Dokumen	59.760.000	0	0
JUMLAH						299.635.000	0	0

3. Peningkatan Kapasitas DPRD

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	4	0	0	Dokumen	2.952.277.159	0	0
1	Orientasi DPRD	1	0	0	Dokumen	608.257.627	0	0
2	Pendalaman Tugas DPRD	5	0	0	Dokumen	1.599.989.000	0	0
3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	0	0	Dokumen	263.620.532	0	0
	JUMLAH					2.671.877.159	0	0

4. Penyerapan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2	0	0	Dokumen	708.854.000	0	0
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3	0	0	Laporan	50.000.000	0	0
	JUMLAH					50.000.000	0	0

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	2	33,33	Dokumen	120.000.000	22.202.220	18,50
		15	5	33,33	Laporan			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	2	33,33	Dokumen	65.000.000	5.804.500	8,93
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	5	33,33	Laporan	55.000.000	16.397.700	29,81

	JUMLAH					120.000.000	22.202.220	18,50
--	--------	--	--	--	--	-------------	------------	-------

2. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	0	0	Dokumen	3.030.436.375	567.515.636	18,67
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30		100	Orang/Bulan	2.834.156.375	549.655.636	19,39
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	3	25	Laporan	205.280.000	17.860.000	8,70
	JUMLAH					3.030.436.375	567.515.636	18,67

3. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	6	25	Laporan	401.072.800	19.593.200	4,89
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3	25	Laporan	55.000.000	1.026.500	1,87
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	25	Laporan	239.922.800	18.564.700	7,74
	JUMLAH					294.922.800	19.593.200	6,64

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	6	25	Laporan	1.598.309.090	210.267.971	13,16
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3	25	Laporan	219.962.595	12.662.265	5,76
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	3	25	Laporan	220.900.000	41.205.706	18,65
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	3	25	Laporan	1.157.446.495	156.400.000	13,51
	JUMLAH					1.598.309.090	210.267.971	13,16

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	3	25	Laporan	274.804.400	24.213.500	29,15
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	3	25	Laporan	63.051.700	24.213.500	29,15
JUMLAH						63.051.700	24.213.500	29,15

6. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		12	3	25	Laporan	18.600.602.089	3.893.612.522	20,93
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12	3	25	Laporan	18.600.602.089	3.893.612.522	20,93
	JUMLAH					18.600.602.089	3.893.612.522	20,93

7. Layanan Administrasi DPRD

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		12	3	25	Laporan	1.454.251.900	241.161.774	16,58
1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	3	25	Laporan	934.873.500	228.550.000	24,45
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12	3	25	Laporan	519.378.400	12.611.774	2,43
JUMLAH						1.454.251.900	241.161.774	16,58

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota							
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	0	0	Dokumen	1.397.305.200	288.472.811	20,64
1	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	0	0	Dokumen	1.397.305.200	288.472.811	20,64
	JUMLAH					1.397.305.200	288.472.811	20,64

2. Peningkatan Kapasitas DPRD

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	8	8	0	Orang/Bulan	2.952.277.159	38.400.000	1,30
1	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8	8	100	Orang/Bulan	280.400.000	38.400.000	13,69
	JUMLAH					280.400.000	38.400.000	13,69

3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6	1	16,67	Laporan	708.854.000	168.866.900	23,82
1	Pelaksanaan Reses	3	1	33,33	Laporan	658.854.000	168.866.900	25,63
	JUMLAH					658.854.000	168.866.900	25,63

4. Fasilitas Tugas DPRD

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	36	9	25	Laporan	10.736.938.000	2.187.427.355	20,37

1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	3	25	Laporan	8.335.082.000	1.617.529.837	19,41
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	3	25	Laporan	1.300.000.000	297.667.185	22,89
3.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	3	25	Laporan	1.101.856.000	272.330.333	24,72
JUMLAH						10.736.938.000	2.187.427.355	20,37

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada;

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Sasaran	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH								

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

1. Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :
 - a. **Perencanaan yang Komprehensif** : Penyusunan target dan sasaran kinerja dilakukan melalui analisa kebutuhan yang matang sehingga program lebih realistis dan terukur.]
 - b. **Dukungan Kelembagaan dan Koordinasi** : Sinergi yang baik antara unsur pimpinan, anggota dewan, dan staf sekretariat menciptakan lingkungan kerja yang solid.
 - c. **Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)** : Ketersediaan aparatur yang kompeten dan memahami tugas pokok serta fungsinya sebagai fasilitator kegiatan dewan.
 - d. **Evaluasi dan Pengendalian Berkala** : Pelaksanaan monitoring serta evaluasi program secara rutin membantu mengidentifikasi masalah lebih cepat dan menyesuaikan solusi di lapangan.

2. Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :
 - a. **Perubahan Kebijakan dan Anggaran** : Adanya refocusing, rasionalisasi, atau pergeseran alokasi anggaran di tengah tahun berjalan yang membuat beberapa sub kegiatan tidak dapat dieksekusi sesuai rencana
 - b. **Dinamika Agenda DPRD** : Jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang sangat padat dan dinamis sering kali menyebabkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sekretariat
 - c. **Keterlambatan Regulasi dan Dokumen**: Proses pencairan dana atau kegiatan sering tertunda karena lambatnya penetapan peraturan atau petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat/daerah.
 - d. **Peran Sebagai Fasilitator** : Karakteristik tugas Sekretariat DPRD adalah melayani/memfasilitasi anggota dewan. Hal ini membuat realisasi sangat bergantung pada tingkat keaktifan pimpinan dan anggota dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan atau tugas kedewanan.
 - e. **Kesesuaian Indikator Kinerja** : Adanya ketidaksesuaian antara target indikator program dan kondisi riil di lapangan, sehingga target menjadi sulit atau tidak relevan untuk dicapai.
- 2.1.5 **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:**

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025.

 - a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta

kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.

- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Sekretariat DPRD tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Sekretariat DPRD mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah

tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	B	BB	BB	100	A	A	
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	7 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	7 Dokumen	100
		Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	7 Dokumen	
	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai Dengan Perundang Undangan					100			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	100	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah					0			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	0 Orang	0	4 Orang	0 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Umum dan Pelayanan yang Tersedia					100			
		Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan					100			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	5 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan nilai aset					-			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Kursi, Meja, Lemari Arsip, dll)	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia					100			
		Jumlah jasa					100			

		penunjang perkantoran yang disediakan								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					100			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100	12 Unit	12 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	40 Paket	40 Paket	40 Paket	100	40 Paket	40 Paket	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	4 Unit	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					100			
	Penyelenggaraan	Jumlah Anggota	40	40	40	40	100	40	40 Orang/Bulan	

	Administrasi Keuangan DPRD	DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	Orang/Bulan	Orang/Bulan	Orang/Bulan		Orang/Bulan		
	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Stel	5 Stel	5 Stel	5 Stel	100	5 Stel	5 Stel	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	0 Orang	40 Orang	40 Orang	100	40 Orang	0 Orang	
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD					100			
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui					100			
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	

	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					100			
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD					100			
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	-	-	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	100	8 Orang	8 Orang	
	Penyerapan dan	Persentase					100			

	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	-	-	-	-	-	0 Laporan	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD					100			
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100	16 Dokumen	16 Dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	28 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100	27 Dokumen	27 Dokumen	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2021 tentang SOTK, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki :

1. Sekretaris DPRD

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan siding dan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Umum

Mempunyai tugas mengolah, merencanakan kebutuhan rumah tangga, surat menyurat, memelihara perlengkapan, pembinaan kepegawaian sekretariat dan menyelenggarakan administrasi umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan undangan dan bahan-bahan untuk kegiatan persidangan, rapat paripurna, rapat fraksi dan rapat - rapat lainnya;
- b. pelaksanaan pekerjaan surat-menyurat yang diperlukan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- c. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD;
- d. pengaturan tatalaksana keprotokoleran terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
- f. pengurusan kendaraan dan barang-barang lainnya dan penyelenggaraan kebersihan serta keamanan pada Sekretariat DPRD;
- g. perencanaan dan pelayanan kebutuhan peralatan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan pada kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;
- h. pelaksanaan pengadaan dan inventarisasi peralatan/perlengkapan kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;
- i. pelayanan informasi dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dan anggota DPRD; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Umum terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan administrasi Kepegawaian pada Sekretariat DPRD dan menyediakan kebutuhan yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;
- 4) Pengaturan dan pengawasan penerimaan surat masuk, surat keluar dan pengiriman surat;
- 5) penyampaian laporan secara lisan dan/ atau tulisan kepada Sekretariat DPRD melalui Kepala Bagian Umum; dan/atau
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perelengkapan dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, pengelolaan barang inventaris dan aset, serta melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan kendaraan dinas, kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kebersihan taman dan keamanan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perelengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan dan rencana pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD;
- 2) penerimaan dan pendistribusian barang dan aset Sekretariat DPRD;
- 3) pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset Sekretariat DPRD;
- 4) penyiapan tempat keperluan rapat dinas dan pertemuan dinas lainnya;
- 5) pengawasan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas;
- 6) pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD;
- 7) pengaturan keamanan dan pemeliharaan kebersihan ruangan kantor, gedung dan taman; dan/atau

8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Masyarakat dan Protokoler

Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dan aspirasi kepada masyarakat serta mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kehumasan dan keprotokolan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Masyarakat dan Protokoler menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Sub-Subtansi Humas dan Protokoler;
- 2) penyiapan dan pengaturan pelaksanaan acara yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD;
- 3) penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu DPRD yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
- 4) pengaturan keprotokolan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan dan upacara resmi;
- 5) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan/atau
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data untuk menyusun perencanaan kegiatan bagian persidangan dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan sidang DPRD, membuat risalah serta kelengkapan administrasi sidang sesuai dengan agenda kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan bagian persidangan dan jadwal kegiatan rapat dan sidang DPRD;
- b. penyiapan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD pada

waktu rapat dan sidang;

- c. pelaksanaan pencatatan dan penyusunan risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD;
- d. penyiapan rancangan keputusan DPRD dan produk peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- f. pengumpulan dan pengolahan data pengkajian peraturan perundang-undangan yang diperlukan;
- g. pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian kegiatan DPRD; dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan terdiri dari :

- a. **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rapat dan Risalah**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Rapat dan Persidangan DPRD, menyimpulkan dan melaporkan hasil rapat dan persidangan serta membuat dan menyusun risalah rapat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rapat dan Risalah menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan dan penyusunan program/jadwal, undangan kegiatan DPRD;
- 2) penyediaan bahan-bahan kebutuhan persidangan dan rapat DPRD;
- 3) pelaksanaan kegiatan sidang dan rapat-rapat sesuai agenda Badan Musyawarah DPRD;
- 4) pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi anggota DPRD;
- 5) penyelenggaraan pedoman penyusunan dan pembuat risalah Rapat;
- 6) penyusunan, pengumpulan, penyimpanan dan pembuatan laporan hasil siding DPRD; dan/atau
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hukum dan Perundang-undangan

Mempunyai tugas mengumpulkan dan menghimpun peraturan Perundang-Undangan, melakukan evaluasi, pengkajian dan penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengumpulan dan pengevaluasian peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
- 2) penyiapan rancangan Surat Keputusan Pimpinan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) penghimpunan Draft Produk-Produk Hukum yang akan dibahas DPRD;
- 4) pengkajian dan penelitian peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD;
- 5) penyusunan saran dan pertimbangan serta kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
- 6) pendokumentasian bahan serta produk peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan; dan/atau;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Dokumentasi dan Perpustakaan

Mempunyai tugas mencari, menghimpun, mengumpulkan dan menyiapkan bahan/ data di Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Dokumentasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kerja di Sub-Substansi Perpustakaan dan Dokumentasi;
- 2) pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian

bahan kebijakan di bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat DPRD;

- 3) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub-Substansi Perpustakaan dan Dokumentasi;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan DPRD;
- 5) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- 6) penyelenggaraan pelayanan dokumentasi produk hukum;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan dan dokumentasi, dan/atau
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data serta menganalisa untuk menyusun perencanaan, program, pedoman, petunjuk dan kebijakan bidang keuangan dan menyiapkan penyusunan pelaporan keuangan dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kegiatan sekretariat dan anggota DPRD;
- b. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
- c. penyusunan laporan keuangan, LPPD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
- e. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bagian keuangan; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Anggaran

Mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan petunjuk teknis pembinaan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD;
- 2) penyelenggaraan pengajuan rencana, perubahan dan perhitungan anggaran sekretariat dan anggota DPRD;
- 3) penyusunan Renstra, Lakip dan LPPD Kepala Daerah Sekretariat DPRD;
- 4) pengelolaan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
- 5) penyusunan dan penetapan anggaran kas Sekretariat DPRD; dan/ atau
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta melakukan penerimaan dan pembayaran setiap kegiatan sekretariat dan Anggota DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan, pengetikan, anggaran untuk pengajuan mendapatkan SPMU;
- 2) pelaksanaan permintaan uang dan pencairan SPMU;
- 3) pelaksanaan perbendaharaan, belanja langsung dan belanja tidak langsung di lingkungan Sekretariat DPRD.
- 4) pelaksanaan pembayaran untuk kegiatan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD; dan/ atau
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- c. **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Verifikasi dan Akuntansi**
Mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, menyelenggarakan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan pemeriksaan dan melakukan penatausahaan keuangan Sekretariat dan Anggota DPRD

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan belanja publik, fisik dan non fisik;
- 2) Penyelenggaraan verifikasi belanja publik, fisik dan non fisik;
- 3) Pelaksanaan penagihan dan peringatan atau teguran tertulis agar segera membuat laporan pertanggungjawaban baik belanja aparatur, belanja publik, fisik dan non fisik;
- 4) Penelitian dan pengevaluasian dokumen yang berkaitan dengan pembayaran SPJ realisasi belanja;
- 5) Pencatatan hasil pengesahan baik dokumen SPJ/bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran dan penyeteroran kembali; dan/atau
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|-------------------|---|---|
| a). | Tujuan | : | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Legislatif Daerah |
| b). | Sasaran | : | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD |
| c). | Indikator Kinerja | : | 1. Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD
2. Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat |

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2024	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	81%	81%	82%	82%	77,89%	78,43%			Tidak Berhasil
2.	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD oleh Inspektorat	BB	A	A	A	BB	BB			Berhasil

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Sekretariat DPRD. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	1. Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	%	81	78,43	96,82	Baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Terhadap Sekretariat DPRD	2. Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	Nilai	80	77,65	97,06	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat, dengan nilai BB, kategori Baik.
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 2) Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD, dengan persentase 77,99%, kategori Tidak Baik

I. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	1. Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	%	81	78,43	96,82	Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2024 Realisasi dari indikator ini adalah berdasarkan hasil kuesioner tingkat kepuasan Anggota DPRD yang dilaksanakan dari 5 aspek bidang penilaian dan 27 indikator penilaian. Berdasarkan hasil rekapitulasi didapatkan hasil sebanyak 822 indikator penilaian menyatakan puas dan 232 indikator penilaian menyatakan tidak puas. Atau sebanyak 78,43% menyatakan puas terhadap tingkat pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD.

II. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Terhadap Sekretariat DPRD

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Terhadap Sekretariat DPRD	2. Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	Nilai	80	77,65	97,06	Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2024 Realisasi dari indikator ini adalah berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat, dengan nilai BB kategori Baik. Keberhasilan pencapaian indikator ini ikut didukung dengan komitmen, kerjasama dan upaya perbaikan secara terus menerus untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja mulai dari proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan secara baik dan efektif.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKK) berikut capaian IKD Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 :

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 :

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat DPRD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan	8	8	8	8	7	4			
2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
3.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
4.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	75	50			
5.	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	100	100	100	100	100	100			
6.	Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	75	75	75	75	100	100			
7.	Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	82	82	82	82	95,70				

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Dari target 8 Ranperda yang disetujui, 4 Ranperda yang disetujui bersama. Hal ini dikarenakan masih ada Ranperda masih dalam proses Harmonisasi KEMENKUMHAM Kanwil Provinsi Sumatera Barat.

**Usulan Propemperda yang telah Harmonisasi Kemenkum Ham
Kanwil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Unit/Instansi terkait
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2025-2045.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang LKPD Bupati Padang Pariaman Tahun 2023	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	Badan Pengelola Keuangan Daerah

2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun pada kegiatan Fasilitasi Badan Musyawarah
3. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).
 - a) Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), dilaksanakan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar).
 - b) Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan pada kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapemperda).

4. Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu.
 - a. Penetapan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024
 - b. Penetapan Ranperda APBD Tahun 2025

5. Cakupan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD

Telah terfasilitasinya kegiatan pelaksanaan Reses Anggota DPRD sebanyak (dua) kali pada tahun 2024 dengan Jadwal sebagai berikut :

**Jadwal Pelaksanaan Reses Dapil DPRD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024**

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan
1	Reses I	16 s/d 20 Januari 2024	40 Anggota DPRD
2	Reses II	20 s/d 25 Oktober 2024	40 Anggota DPRD

6. Cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi.

Pada Tahun 2024 capaian cakupan kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi sebesar 95,70%. Kegiatan yang mendukung adalah :

- a. Orientasi DPRD
- b. Pendalaman Tugas DPRD

Jadwal Pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD Tahun 2024

Uraian	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Bimtek I	Hotel Grand Basko Padang	03 s/d 06 April 2024
Bimtek II	The Acacia Hotel dan Resort Jakarta Pusat	07 s/d 10 Juni 2024
Bimtek III	Hotel Horison Balirung Jakarta	11 s/d 14 Oktober 2024

- c. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- e. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a. **Tingkat Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari 2 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :**
 1. **Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD dengan realisasi sebesar 78,43%**
- b. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman antara lain :**
 1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) :** Terdapat kesenjangan kompetensi dan keahlian pegawai yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung tugas-tugas teknis, administrasi, maupun penyediaan Tenaga Ahli yang dibutuhkan.
 2. **Sarana dan Prasarana :** Kurangnya fasilitas penunjang serta pengembangan kelembagaan yang optimal sehingga menghambat kelancaran pelayanan administrasi bagi para Anggota DPRD.
 3. **Pertanggungjawaban dan Administrasi :** Lambatnya proses penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dan administrasi yang dapat memperlambat kinerja utama dewan dalam mengesahkan peraturan maupun pengawasan.
 4. **Kapasitas Kelembagaan:** Belum efektifnya struktur organisasi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan secara maksimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Sekretariat DPRD per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (T-C 31)

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang Ditindaklanjuti	90%	26.583.479.964	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang Ditindaklanjuti	92%	22.871.027.140
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	
			Persentase Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD yang Difasilitasi	90%				Persentase Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD yang Difasilitasi	92%	
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung yang Disediakan	86%				Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung yang Disediakan	87%	
			Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Difasilitasi	86%				Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Difasilitasi	87%	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	7 Dokumen	120.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	8 Dokumen	92.256.260
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	66.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	36.999.600
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	56.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	56.256.760

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	2 Laporan	3.838.488.375	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	2 Laporan	2.385.360.865
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	2.834.158.375	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.651.530.955
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	205.280.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	214.320.000
4.02.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	6 orang	75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	6 orang	0
			Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji berkala	3 Orang				Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji berkala	30 Orang	
			Jumlah BKP ASN	31 Orang				Jumlah BKP ASN	38 Orang	
			Jumlah ASN yang terfasilitasi pembayaran TPP	31 Orang				Jumlah ASN yang terfasilitasi pembayaran TPP	38 Orang	
4.02.01.2.05.0010	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	0
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0
4.02.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai kelengkapan dan terdistribusi sesuai tujuan	1.440 Surat	401.072.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai kelengkapan dan terdistribusi sesuai tujuan	1.440 Surat	534.881.000
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 Pelayanan				Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 Pelayanan	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	40.060.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.981.430
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	66.090.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	201.647.500
4.02.01.2.06.0008	Fasilitas/Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000	Fasilitas/Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.542.900

4.02.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	12 Laporan	238.922.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	12 Laporan	230.795.990
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Penambahan Nilai Aset	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Penambahan Nilai Aset	-	0
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0
	Pengadaan Meubel	Sekretariat DPRD	Jumlah paket Meubel yang disediakan	0	0	Pengadaan Meubel	Sekretariat DPRD	Jumlah paket Meubel yang disediakan	-	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	0
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan yang Tersedia	12 Bulan	1.698.308.080	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan yang Tersedia	12 Bulan	1.348.218.617
			Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang Disediakan	12 Bulan				Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang Disediakan	12 Bulan	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	219.962.595	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	188.041.215
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182.704.994
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.157.446.485	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	872.472.708
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Objek Aset yang Terkelola	117 Unit	274.804.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Objek Aset yang Terkelola	118 Unit	228.078.300
			Jumlah Total Nilai Aset	=====				Jumlah Total Nilai Aset	14.505.693.879	

4.02.01.2.05.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	130.502.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	80.433.100
4.02.01.2.05.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	61.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	61.432.730
4.02.01.2.05.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	83.051.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	61.207.470
4.02.01.2.16	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	12 Laporan	18.866.802.088	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	12 Laporan	18.368.790.426
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	17.713.513.888	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	15.678.025.526
4.02.01.2.16.0002	Belanja Pakelan Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	731.120.000	Belanja Pakelan Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	676.174.000
4.02.01.2.16.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	155.568.200	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	4.530.900
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD yang terfasilitasi	12 Laporan	1.464.261.800	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD yang terfasilitasi	12 Laporan	1.382.817.873
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	934.873.500	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	840.412.861
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	519.378.400	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	522.504.312
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	100%	18.388.837.368	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	100%	17.382.847.834

			Persentase Penetapan Raperda tahun N	86%				Persentase Penetapan Raperda tahun N	86%	
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80%				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	81%	
			Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Peningkatan Kapasitas DPRD	90%				Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Peningkatan Kapasitas DPRD	81%	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8 Dokumen	183.628.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8 Dokumen	42.820.405
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	193.628.000	Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	42.820.405
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	268.885.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	264.882.760
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PRAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PRAS	1 Dokumen	59.410.000	Pembahasan KUA dan PRAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PRAS	1 Dokumen	20.556.250
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PRAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PRAS	1 Dokumen	50.145.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PRAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PRAS	1 Dokumen	18.342.500
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	60.160.000	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	218.600.000
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	60.160.000	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	14.450.000
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	59.760.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	23.034.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Penyelenggaraan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.397.305.200	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Penyelenggaraan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.348.936.729
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1.397.305.200	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1.349.936.729
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	2	2.662.277.168	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	2	2.168.017.488

4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	808.257.627	Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	301.235.258
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	1.599.989.000	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	1.467.333.391
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	230.400.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	230.400.000
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3 Dokumen	263.620.532	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3 Dokumen	155.048.317
4.02.02.2.06	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	2	708.864.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	2	386.019.200
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	50.000.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	0
4.02.02.2.05.0003	Peleaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	658.854.000	Peleaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	386.019.200
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	2	10.738.933.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	2	10.121.371.284
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	8.336.082.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	10.484.957.828
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	1.300.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	1.291.813.543
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.101.856.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.355.069.913
					41.862.114.013					40.033.874.874

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD tidak mempunyai program dan kegiatan untuk masyarakat.

Tabel 2.7

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH							

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat DPRD lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini

memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1.

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelajaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2.
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
	kemiskinan	Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas,

perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah *"Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD"* dan *"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"* dengan Indikator Tujuan *"Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD"* dan *"Nilai SAKIP Pemerintah Daerah"*.

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahun 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025
1	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	78	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	85
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	71,40	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa

tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.

- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4. (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang Ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	90%	26.277.626.371	DAU		92%	21.561.943.430
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
		Persentase Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD yang Difasilitasi		90%				92%	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung yang Disediakan		85%				87%	
		Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Difasilitasi		85%				87%	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	Sekretariat DPRD	7 Dokumen	128.117.600	DAU		6 Dokumen	85.000.000
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan				15 Laporan	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	7 Dokumen	90.069.200	DAU		6 Dokumen	55.000.000
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	15 Laporan	38.048.400	DAU		15 Laporan	40.000.000

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang Undangan	Sekretariat DPRD	2 Laporan	3.684.695.172	DAU		2 Laporan	4.216.318.244
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	31 Orang/bulan	3.434.615.172	DAU		36 Orang/bulan	3.966.238.244
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	250.080.000	DAU		12 Dokumen	250.080.000
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Sekretariat DPRD	5 orang	53.516.000	DAU		5 orang	53.516.000
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji berkala		9 Orang		DAU		30 Orang	
		Jumlah SKP ASN		31 Orang		DAU		36 Orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi pembayaran TPP		31 Orang		DAU		36 Orang	
4.02.01.2.05.0010	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat DPRD	0	-	DAU			0
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	4 Orang	53.516.000	DAU		4 Orang	53.516.000
4.02.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Sekretariat DPRD	1.440 Surat	304.582.000	DAU		1.450 Surat	279.132.800
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi		3 Pelayanan		DAU		3 Pelayanan	
4.02.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	5 Paket	24.397.800	DAU		5 Paket	24.397.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	5 Paket	22.755.000	DAU		5 Paket	99.745.000
4.02.01.2.05.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	12 Laporan	54.990.000	DAU		12 Laporan	54.990.000
4.02.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	12 Laporan	202.439.200	DAU		12 Laporan	100.000.000

4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	Sekretariat DPRD	686.075.000	686.075.000	DAU		450.000.000	450.000.000
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sekretariat DPRD	1 Unit	686.075.000	DAU		2 Unit	100.000.000
	Pengadaan Meubel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Sekretariat DPRD	0	0	DAU		5 Paket	250.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Sekretariat DPRD	0	0	DAU			100.000.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	Sekretariat DPRD	12 Bulan	1.470.559.730	DAU		12 Bulan	1.253.559.730
		Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang Disediakan		12 Bulan		DAU		12 Bulan	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	12 Laporan	219.397.250	DAU		12 Laporan	169.397.250
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	222.000.000	DAU		12 Laporan	216.000.000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1.029.162.480	DAU		12 Laporan	908.172.480
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Objek Aset yang Terkelola	Sekretariat DPRD	117 Unit	218.459.000	DAU		119 Unit	203.455.000
		Jumlah Total Nilai Aset		4.221.235.667				14.505.663.879	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekretariat DPRD	13 Unit	58.440.000	DAU		15 Unit	58.440.000
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekretariat DPRD	100 Unit	76.769.000	DAU		100 Unit	76.769.000
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretariat DPRD	4 Unit	68.250.000	DAU		4 Unit	68.250.000

4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	18.133.826.769	DAU		12 Laporan	13.723.152.556
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	40 Orang/Bulan	17.544.435.969	DAU		40 Orang/Bulan	13.233.761.756
4.02.01.2.15.0002	Belanja Pakalan Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	5 Paket	468.920.000	DAU		5 Paket	418.920.000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	40 Orang	120.470.800	DAU		40 Orang	70.470.800
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD yang terfasilitasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	1.567.795.100	DAU		12 Laporan	1.247.795.100
4.02.01.2.16.0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	12 Laporan	710.805.800	DAU		12 Laporan	510.805.800
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Sekretariat DPRD	12 Paket	886.989.300	DAU		12 Paket	736.989.300
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	Sekretariat DPRD	100%	13.456.255.800	DAU		100%	9.638.056.570
		Persentase Penetapan Ranperda tahun N		85%				86%	
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		50%				51%	
		Persentase Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Peningkatan Kapasitas DPRD		90%				91%	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD	6 Dokumen	315.171.000	DAU		6 Dokumen	165.171.000
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	6 Dokumen	319.171.000	DAU		6 Dokumen	169.171.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD	5 Dokumen	760.910.000	DAU		5 Dokumen	560.945.000
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	43.350.000	DAU		1 Dokumen	43.350.000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	44.065.000	DAU		1 Dokumen	44.065.000

4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	314.255.000	DAU		1 Dokumen	214.255.000
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	314.220.000	DAU		1 Dokumen	214.255.000
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	45.020.000	DAU		1 Dokumen	45.020.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Penyelenggaraan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	856.534.000	DAU		1 Dokumen	1.156.534.000
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	856.534.000	DAU		1 Dokumen	1.156.534.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi	Sekretariat DPRD	3	2.522.058.000	DAU		3	2.051.705.520
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	0	DAU		-	0
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	5 Dokumen	2.002.229.000	DAU		5 Dokumen	1.671.866.520
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	8 Orang	280.400.000	DAU		8 Orang	230.400.000
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	239.439.000	DAU		3 Dokumen	189.439.000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	Sekretariat DPRD	2	743.234.000	DAU		2	693.234.000
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	3 Laporan	40.000.000	DAU		3 Laporan	40.000.000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	703.234.000	DAU		3 Dokumen	653.234.000
4.02.02.2.06	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	3	8.254.338.800	DAU		3	4.986.467.050
4.02.02.2.06.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	6.329.824.800	DAU		12 Dokumen	2.555.545.896

4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	666.458.000	DAU		12 Dokumen	1.152.765.154
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	1.258.056.000	DAU		12 Dokumen	1.258.056.000
					59.733.882.171				31.200.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Perencanaan Subsektor Peningkatan Pelayanan Tahun Anggaran 2025		REKAPITULASI DUA BELAS
---	--	---

1. *Suppose that*

[illegible]

[illegible]

Gedrag: Jeugdwerkbegeleiding Beveiligingsprogramma van de Regio																			
Gedrag					Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag										Gedrag	
								Gedrag											
								Gedrag											
Gedrag					Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	Gedrag	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52			

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Sekretariat DPRD perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Sekretariat DPRD harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Sekretariat DPRD menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Sekretariat DPRD yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pariaman, 21 Mei 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Drs. ARMEYN RKT, M.Si
NIP. 19681111 199203 1 006

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 SEKTRETARIAT DPRD

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	